

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan informasi saat ini berjalan dengan pesat seiring dengan itu masyarakat semakin cerdas dan kritis menanggapi perkembangan politik dinegara kita. Isu-isu politik sekarang dapat dengan mudah dan cepat menyebar keseluruh lapisan masyarakat

Salah satu institusi yang tidak bisa dilepaskan dari Demokrasi Modern adalah adanya partai politik, sudah menjadi kesepakatan bersama dalam ilmu politik bahwa suatu negara dapat disebut demokratis kalau terdapat partai-partai politik. Sebab, kehadiran partai politik berarti ada pengakuan warga negara untuk berbeda pendapat.<sup>1</sup>

Hal itu juga terjadi pada para perempuan di Indonesia. Mereka tidak kalah kritis menanggapi isu-isu politik yang senantiasa berkembang. Munculnya gagasan untuk memberi tempat pada perempuan didalam politik yang lebih proporsional dengan cepat menyebar keseluruh pelosok negeri. Perspektif transisi menuju negara yang benar-benar demokrasi mendominasi perubahan politik di Indonesia pasca kejatuhan Soeharto pada tahun 1998. Dengan adanya perubahan seperti itu maka hal tersebut menimbulkan reaksi dimasyarakat dan dilingkungan universitas terutama bagi mereka para mahasiswi. Mereka menjadi sadar bahwa porsi politik untuk perempuan harus

diperbanyak karena mayoritas penduduk Indonesia adalah kaum perempuan, mereka sadar bahwa selama beberapa dekade terakhir, perempuan yang terlibat dalam politik hanyalah pihak belakang layar yang tidak pernah terlibat langsung dalam kegiatan politik atau berafiliasi langsung terhadap partai politik.

Perempuan berpolitik bukanlah hal yang baru di Indonesia. Sejak dahulu perempuan telah menjadi bagian dari sistem politik Indonesia bahkan telah ikut menentukan kemajuan bangsa Indonesia. Akan tetapi manakala dari segi kuantitas hal tersebut menunjukkan peningkatan dan adanya tuntutan bahwa keterlibatan perempuan dalam politik merupakan keharusan maka hal tersebut menjadi sesuatu yang baru karena selama beberapa dekade sebelum reformasi perempuan berpolitik hanyalah sekedar aksesoris sehingga kepentingan-kepentingan perempuan tidak pernah terwakilkan.

Kesadaran semacam itu menimbulkan dukungan yang luas terhadap kepentingan perempuan dimasyarakat ataupun parlemen. Mahasiswa dan masyarakat terutama kaum perempuan sangat mendukung adanya peningkatan porsi perempuan dalam politik. Adanya persepsi pribadi tentang politik dan segala sesuatu yang didalamnya membuat politik perempuan terus bertahan dan memperjuangkannya diarena perpolitikan

Begitu juga dengan mahasiswi, mahasiswi merupakan bagian dari mahasiswa yang juga menuntut dan mencari ilmu di universitas. Mereka membaaur dan mencari ilmu atau berbagi ilmu dengan yang lainnya. Oleh

dalam tercapainya suatu kegiatan belajar untuk kepentingan bersama, kepentingan dan proses pembelajaran tersebut pada tingkat universitas dapat dituangkan dalam suatu wadah yaitu melalui organisasi yang ada di Intra atau di Ekstra universitas. Tentunya dalam hal ini para mahasiswa sebagai pengambil keputusan tidak buru-buru dan dapat melihat bagaimana akibat yang ditimbulkan untuk dikemudian hari baik terhadap diri sendiri atau orang lain.

Ketika era reformasi berjalan maka hal inilah yang memungkinkan penyeimbangan kembali posisi laki-laki dan perempuan dengan tujuan mengurangi ketimpangan yang selama ini terjadi. Tujuan ini tidak hendak menggantikan patriarki dengan matriarki, tetapi untuk memastikan bahwa masalah perempuan dan laki-laki harus diberi perhatian yang sama dimasyarakat dan oleh negara itu sendiri.

Dilema kehidupan perempuan sekarang ini semakin terasa takala kita menengok pada fenomena yang akhir-akhir ini menjadi perbincangan menarik seiring perkembangan politik di Indonesia. Obyektifitas dimasyarakat yang menjadi gejala menariknya adalah ketika banyak perempuan yang mengalami ketertarikan pada dunia politik yang luar biasa. Dalam hal ini pemerintah mempertegas melalui Undang Undang No. 12 Tahun 2003 Pasal 65 ayat (1) yang menegaskan bahwa setiap partai politik peserta pemilu dapat mengajukan calon anggota DPR, DPRD Propinsi dan DPRD Kabupaten atau

sekurang kurangnya 30 persen.<sup>2</sup> Padahal di dunia politik yang selama ini menjadi kenyataan sosiologis adalah dunia dimana banyak dibangun relasi-relasi yang bersifat *patriarkis*.

Dalam kehidupan bernegara, terutama di Indonesia, perebutan kursi parlemen dilaksanakan dengan ajang pemilihan umum. Dalam pemilihan umum tersebut para calon wakil yang akan duduk diparlemen merupakan wakil rakyat dari berbagai elemen yang nantinya akan menyampaikan aspirasi rakyat yang diwakilinya. Sehingga apabila nantinya tidak ada perwakilan dari kaum perempuan maka aspirasi kaum perempuan kemungkinan hanya sebuah retorika saja di negara ini, sehingga representasi perempuan di lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif masih sangat minim dan apabila ditampilkan dalam gambar, presentase ini berbentuk piramida terbalik yang artinya semakin rendah tingkat lembaga perwakilan akan semakin kecil pula presentase perempuan.

Jean Jacques Rousseau bahkan menilai model warga negara merupakan perkawinan antara nilai-nilai baik kemiliteran dan kewarganegaraan laki-laki. Selain itu *discourse* tradisionalitas yang merupakan dasar untuk pengambilan keputusan publik sementara perempuan dianggap lebih irasional dan subjektif. Dalam hal ini diyakini hanya aktor-aktor politik laki-laki sajalah yang berwenang mengartikulasikan nilai-nilai publik. Sejak itulah perempuan diasosiasikan lebih dekat atau bersatu dengan alam/nature yang berarti kehidupan *private*, sementara laki-laki dekat dengan dunia bentukan manusia/nurture yang berarti kehidupan politik.<sup>3</sup>

Tantangan utama yang menghadang dan harus menjadi proyek besar politisasi adalah penegakan sistem yang demokratis dan penumbuhan kultur yang demokratis untuk menyongsong sistem yang demokratis. Hal itu pulalah yang harus dilakukan oleh mahasiswa dan mahasiswi terutama melalui

---

<sup>2</sup> Ratnawati, dalam *Politik Transisi Pasca Soeharto*. Fisipol UGM, Yogyakarta, 2004, hal 145

pemahaman pendidikan di Universitas. Karena model yang diciptakan orde baru mengakibatkan miskinnya kita miliki, terutama individu-individu yang siap berurusan persoalan ini pula yang perlu di perhatikan oleh Pemerintahan dimana nantinya mahasiswa Ilmu Politik menghidupkan demokrasi melalui partai politik atau aktif.

Dalam kaitan itu untuk merealisasikan tercapainya semakin demokratis tersebut tentu bukan hanya merujuk meskipun ia yang harus memainkan peran penting, menghormati semua seluruh komponen masyarakat terutama mahasiswa yang terdidik khususnya mahasiswa.

Keterlibatan mahasiswa dibidang politik mesti di terhindarkan, maka persoalannya politisasi seperti ini oleh mahasiswa. Ada dua dimensi yang harus diperhatikan

*Pertama*, posisi mahasiswa sebagai pemimpin bangsa. Dalam posisi ini, mahasiswa tidaklah cukup sebagai calon politisi. Yang lebih penting adalah menempatkan mahasiswa sebagai negarawan.

*Kedua*, posisi mahasiswa sebagai pemilih yang harus menjadi salah satu partai politik. Politisi seharusnya dilakukannya pengkotakkan mahasiswa yang justru akan memperkaya

Perkembangan politik di Indonesia tidak terlepas dari peran serta mahasiswa. Sejarah telah membuktikan bahwa mahasiswa merupakan motor penggerak perubahan demokrasi di Indonesia. Adanya Gerakan Budi Utomo sampai pada Gerakan Mei 1998 yang semuanya membawa perubahan bagi kehidupan perpolitikan di negara Indonesia. Memang pada dasarnya pergerakan tersebut diawali oleh mahasiswa lalu diikuti seluruh lapisan masyarakat di Indonesia, tetapi dengan dipelopori oleh mahasiswa maka seluruh elemen masyarakat ikut serta dalam gerakan tersebut. Walau pada akhirnya banyak jatuh korban dikalangan mahasiswa tetapi hal itu merupakan bukti keeksistensian mahasiswa dalam kancah perpolitikan Indonesia.

Ketertarikan mahasiswa dalam partai politik merupakan bukti nyata bahwa mahasiswa merupakan sumber daya yang potensial dalam membawa dan mewujudkan politik di Indonesia yang lebih demokrasi. Setelah jatuhnya rezim Orde Baru dan mulainya Orde Reformasi yang ditandai oleh lengsernya Soeharto pada tahun 1998 dari kursi kepresidenan yang dipelopori oleh gerakan mahasiswa, demokrasi dan tatanan politik Indonesia memasuki zaman baru, tidak ada lagi hambatan untuk mengemukakan pendapat secara bebas, namun pada awal orde reformasi atau pada masa demokrasi transisi ini tidak mudah untuk memulainya karena masyarakat mengalami kebingungan terhadap partai politik sebab satu partai politik tidak bisa dilepaskan dari citra sebagai partai politik bentukan rezim orde baru sehingga masyarakat takut terbentuk kembali rezim yang lama.

Pada pemilu 2004 yang lalu kita tidak hanya memilih wakil-wakil rakyat yang duduk legislatif saja tetapi juga memilih Presiden dan Wakil Presiden secara langsung, tentunya ini adalah suatu hal yang baru dan pertama kali dalam sistem pemilihan umum di Indonesia yang demokrasi. Perlu kita ketahui walaupun ditiap-tiap negara berbeda dalam menjalankan demokrasi tetapi mempunyai karakteristik sendiri-sendiri, menurut para ahli ilmu politik harus ada berbagai institusi dan kondisi bila mana sistem yang dijalankan oleh suatu negara bisa disebut sebagai suatu sistem yang demokratis.

Pendidikan politik merupakan salah satu metode dalam usaha sosialisasi politik. Almond mengartikan sosialisasi politik adalah proses dimana sikap-sikap politik dan pola-pola tingkah laku politik diperoleh atau dibentuk dan juga merupakan suatu sarana bagi suatu generasi untuk menyampaikan patokan-patokan politik dan keyakinan-keyakinan politik pada generasi berikutnya.<sup>5</sup>

Kini Indonesia sudah memasuki era baru yang diharapkan lebih demokratis, sehingga kita perlu membuka wacana tentang partai politik dan tata cara pemilihan presiden secara langsung. Sistem ini memungkinkan rakyat untuk memberikan suaranya dan memilih secara langsung kepada kandidat Presidennya melalui partai politik yang ada. Sehingga sistem ini oleh para pendukungnya dianggap sebagai suatu mekanisme yang lebih demokratis dan solusi untuk mencegah berbagai distorsi yang terjadi pada sistem pemilihan presiden yang sekarang.

---

<sup>5</sup> ... Politik ... Yogyakarta, 1982 hal 39

Dalam pelaksanaan pemilu sebelumnya sudah terjadi pergantian generasi pemilih, para generasi tua semakin berkurang jumlahnya, sedangkan generasi muda terutama golongan mahasiswa semakin bertambah banyak dan golongan tersebut juga terdapat mahasiswi yaitu golongan perempuan yang nantinya suatu saat akan mewakili aspirasi perempuan di parlemen. Hal itu pula yang menjadi alasan mengapa penulis tertarik melakukan penelitian tentang persepsi mahasiswa terhadap partai politik, dengan sampel mahasiswi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Jurusan Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Universitas atau yang biasa disebut Perguruan Tinggi merupakan satu lembaga pendidikan di Indonesia yang bersifat modern, untuk mempelajari dan memahami bidang-bidang ilmu yang sesuai dengan jurusannya masing-masing. Di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politiknya terbagi menjadi tiga jurusan, diantaranya adalah Jurusan Hubungan Internasional, Jurusan Ilmu Pemerintahan, dan Jurusan Ilmu Komunikasi. Semua jurusan ilmu ini mempelajari tentang ilmu politik dan teori-teori politik. Definisi politik memang berbagai macam, Jalaludin Rakhmat mendefinisikan Politik adalah kegiatan masyarakat yang berkisar pada masalah-masalah Siapa memperoleh apa, Kapan, dan Bagaimana (Who gets what, When, and How ) serta pembagian nilai-nilai oleh yang berwenang.<sup>6</sup>

Di Jurusan Ilmu Hubungan Internasional pada tingkat universitas, Ilmu hubungan internasional berguna untuk mempelajari, membuka wawasan, pikiran dan wacana mahasiswa serta memberikan mahasiswa kemampuan untuk memahami tentang hal-hal yang terjadi diberbagai negara yang ada di dunia secara lebih mendalam. Selain itu dalam mempelajari studi hubungan internasional, mahasiswa dapat memberikan solusi nantinya terhadap persoalan-persoalan sosial dan politik yang terjadi antar negara, tentu saja hal yang di bahas substansinya mesti berkaitan dengan masalah-masalah yang dihadapi masyarakat internasional. Secara epistemologis ilmu pengetahuan hubungan internasional melibatkan :

- Teori-teori hubungan internasional: yaitu tentang pengetahuan apa yang telah diperoleh dalam ilmu ini dan bidang-bidang kehidupan apa yang diliput oleh ilmu hubungan internasional ini.
- Metodologi: yaitu tentang prosedur bagaimana pengetahuan tentang fenomena hubungan internasional itu diperoleh.
- Tehnik dan metode penelitian : yaitu tentang cara-cara penelitian apa yang diterapkan untuk memperoleh pengetahuan itu.<sup>7</sup>

Dalam mempelajari ilmu hubungan internasional mahasiswa juga dapat memahami sejauh mana mereka tetap bisa mempertahankan identitas mereka sendiri ditengah-tengah perubahan yang terjadi antar negara, terutama sekali apa akibat dari perubahan internasional terhadap transformasi nasional dan identitas nasional. Selain itu mahasiswa hubungan internasional juga

mempelajari apa akibat dari transformasi suatu bangsa atau beberapa kelompok kelas sosial dalam bangsa itu terhadap bangsa-bangsa lain dan terhadap sistem internasional.

Pada Jurusan Ilmu Komunikasi Mahasiswa banyak mempelajari tentang opini publik, terlebih lagi hubungan komunikasi dengan politik yang dapat membangkitkan rasa keingin tahuan seseorang terhadap pemberitaan opininya. Dalam ilmu komunikasi ada proses, Seperti komunikasi politik melibatkan pembicaraan tetapi bukan pembicaraan dalam arti sempit, melainkan pembicaraan dalam arti yang inklusif.<sup>8</sup> Oleh sebab itu mahasiswa yang mempelajari ilmu komunikasi mereka memahami konsekuensi-konsekuensi aktual maupun potensial yang mengatur perbuatan manusia di dalam kondisi kondisi tertentu. Mempelajari ilmu komunikasi bagi mahasiswa dapat memberikan kemampuan berkomunikasi dengan lawan komunikasinya sehingga mahasiswa yang mempelajari ilmu komunikasi dapat memperkirakan dengan tepat kesukaan dan ketidaksukaan seseorang terhadap apa yang mereka inginkan. Oleh sebab itu ilmu komunikasi lebih menitik beratkan pada saluran atau penyambung bersama tentang siapa dapat berbicara kepada siapa, mengenai apa, dalam keadaan bagai mana, dan sejauh mana hal yang dibicarakan dapat dipercaya.

Begitu juga perkembangan studi ilmu politik terutama Jurusan Ilmu Pemerintahan di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Studi Ilmu Pemerintahan semakin berkembang dengan sistem pendidikan yang

---

dikembangkan dan diberikan oleh para pengajar. Mulai dari tentang politik sampai pada pemahaman terhadap suatu partai politik didalam negara telah didapat oleh para mahasiswanya, hal itu diperoleh dari awal perkuliahan sampai pada penyusunan tugas akhir. Sehingga dengan pengetahuan yang di dapat oleh mahasiswa, nantinya mereka mampu untuk memahami bagaiman keadaan politik pada saat ini dan dapat juga memprediksi apa saja yang akan terjadi pada perkembangan politik berikutnya. Pada jurusan Ilmu Pemerintahan, mahasiswa di berikan pemahaman pendidikan tentang pemerintahan sehingga di Jurusan Ilmu Pemerintahan mahasiswa harus dapat memadukan antara kepentingan politik dan kepentingan pemerintahan. Pengertian Pemerintahan itu sendiri menurut Mariun terbagi dua yaitu : pemerintahan dalam arti sempit dan pemerintahan dalam arti luas. Pemerintahan dalam arti sempit yaitu diartikan sebagai tugas/kewenangan atau kekuasaan khusus dalam bidang eksekutif saja. Sedangkan Pemerintahan dalam arti luas adalah segala tugas/kewenangan/kekuasaan negara dan apabila kita mengikuti perbandingan Montesquie pemerintahn dalam arti luas yaitu meliputi bidang Legislatif, Eksekutif, dan Yudikatif.<sup>9</sup>

Selain itu mahasiswa Jurusan Ilmu Pemerintahan juga diberikan pengertian dan pemahaman serta pendidikan bahwa pada dasarnya politik di bagi menjadi dua yaitu politik secara keilmuan dan politik secara praktis. Politik secara keilmuaan memandang politik dari segi teori. Itulah sebanya para pakar dan tokoh politik menekankan teori politik sebagai sarana untuk

mempelajari ilmu politik. Sedangkan politik praktis merupakan politik secara riil yang dipraktekkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dalam mempertahankan kekuasaan sehingga hal tersebut harus dapat disatukan antara kepentingan politik dengan kepentingan negara yang diatur oleh pemerintahan didalam negara itu sendiri.

Penelitian seperti ini pernah juga dilakukan di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta pada jurusan yang sama pada tahun 2000. Tetapi Studi Kasus yang dibahas adalah menyeluruh dalam arti penelitian dilakukan untuk seluruh mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, sehingga penelitian tersebut tidak dapat mengetahui seberapa besar persepsi mahasiswa, terutama mahasiswa Jurusan Ilmu Pemerintahan yang mempelajari tentang partai politik dan pemerintahan di dalam negara. Kita ketahui bahwa mahasiswa jurusan ilmu pemerintahan banyak mempelajari ilmu-ilmu politik baik yang di dapat langsung dari pertemuan-pertemuan didalam kelas atau dapat juga melalui bacaan-bacaan atau wacana lain yang menyangkut tentang ilmu yang sedang dipelajari. Selain itu untuk memahami ilmu politik, pada jurusan ilmu pemerintahan mahasiswa dan mahasiswinya banyak mempelajari materi-materi yang mendukung pemahaman bagi mereka, seperti Politik Legislasi di Indonesia, Sistem Politik Di Indonesia sampai pada Sistem Pemerintahan Republik Indonesia dan lain-lain.

Hal inilah yang menjadikan ketertarikan penulis untuk mengambil

..... Universitas Muhammadiyah Yogyakarta sebagai lokasi

penelitiannya. Dalam penelitian ini nantinya penulis juga ingin mengetahui sejauh mana pemahaman dan persepsi mahasiswi Jurusan Ilmu Pemerintahan terhadap partai politik dari apa yang dipelajari dan di pahami selama ini. Selain itu di era reformasi ini memungkinkan untuk para mahasiswi Ilmu Pemerintahan untuk memulai melakukan penyeimbangan kembali posisi perempuan dan laki-laki dengan tujuan mengurangi ketimpangan yang telah terjadi selama ini, dan tentu saja mahasiswi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Jurusan Ilmu Pemerintahan dalam hal ini bukan hendak menggantikan posisi patriarki dengan matriarki, tetapi tetap bertujuan untuk memastikan bahwa masalah perempuan dan laki-laki harus diberi perhatian yang sama oleh negara dan didalam masyarakat. Dengan memperhatikan hal tersebut mahasiswi jurusan ilmu pemerintahan dapat menerapkan apa yang diperlukan dimasyarakat untuk kepentingan bersama terutama kepentingan perempuan, tentusaja untuk melakukan hal tersebut diperlukan suatu pembelajaran terlebih dahulu dalam tingkat yang lebih kondusif.

Lebih dari setengah penduduk Indonesia adalah perempuan, namun mereka memiliki pengaruh kecil dalam pembuatan keputusan diparlemen, hal ini disebabkan karena jumlah perempuan yang sedikit dan masih didominasi oleh kaum pria. Ketimpangan ini diperkuat oleh rezim orde baru yang melihat perempuan semata-mata di bawah pria. Namun di era reformasi muncul penyeimbangan posisi perempuan dan laki-laki hal itu untuk mengurangi ketimpangan yang terjadi selama ini. Adanya penambahan jumlah kuota

12 Tahun 2003 Pasal 65 ayat (1) yang isinya bahwa setiap partai politik peserta pemilu dapat mengajukan calon anggota DPR, DPRD Propinsi dan DPRD Kabupaten atau Kota untuk setiap daerah pemilihan dengan memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30 persen. Hal inilah yang diperhatikan oleh perempuan terutama mahasiswa yang nantinya akan berhubungan dengan kehidupan di masyarakat. Melalui lembaga Universitas, mahasiswa Universitas Muhammadiyah Yogyakarta terutama Fakultas Ilmu Sosial Politik Jurusan Ilmu Pemerintahan dapat memahami perkembangan-perkembangan yang terjadi dalam perubahan politik di Indonesia. Di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta kelompok-kelompok perempuan yang berorganisasi ditampung dalam organisasi pergerakan perempuan seperti Aisyah dan Naisiyatul Aisyah (NA) atau kegiatan mahasiswa berorganisasi dapat disampaikan melalui organisasi kemahasiswaan yang ada seperti IMM dan HMI.

Di organisasi kemahasiswaan seperti IMM dan HMI ini aspirasi mahasiswa dapat disampaikan lalu ditindak lanjutkan ke lembaga yang lebih tinggi lagi yang ada di lingkungan universitas terutama Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Dari sini pulalah proses belajar mahasiswa terutama mahasiswinya dapat mengetahui bagaimana aspirasi atau maksud mereka dapat disampaikan dan diterima di lingkungan universitas.

Melalui pendidikan dari universitas mahasiswa ataupun mahasiswa dapat berorganisasi di masyarakat walau pada kenyataannya dimasyarakat

organisasi politik yang tidak berideologi agama lebih cenderung maju dan mempunyai banyak masa pendukungnya atau sebaliknya, tetapi hal itu tidak menjadikan suatu organisasi politik yang berideologi agama tidak diperhatikan, hal itu pulalah yang nantinya menjadi tugas mahasiswa yang apabila nantinya ikut serta dalam politik praktis di organisasi politik yang ada di masyarakat, baik yang berideologi agama atau berideologi non agama hal itu dilakukan untuk memajukan dan mempertahankan organisasi tersebut. Sehingga nantinya walaupun suatu partai politik tersebut berideologikan agama kepentingan perempuan tetap diutamakan untuk memenuhi kuota di parlemen sebagai wakil perempuan. Tentu saja keterlibatan perempuan di parlemen nantinya yang perlu di ketahui oleh mahasiswa dan mahasiswi bukan hanya dalam pengambilan kebijakan di bidang politik, tapi juga dalam bidang ekonomi, sosial maupun budaya. Hal ini melihat bahwa keputusan di parlemen mencakup semua aspek kehidupan dalam rangka berbangsa dan bernegara.

## **B. Rumusan Masalah**

Dari uraian yang dirumuskan didalam latar belakang masalah diatas maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut :

*Bagaimana Persepsi Mahasiswi Jurusan Ilmu Pemerintahan  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah  
Yogyakarta terhadap Partai Politik di Indonesia ?*

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **a. Tujuan penelitian**

1. Mengetahui dan menjelaskan secara objektif mengenai persepsi mahasiswi terhadap keberadaan partai politik.
2. Mengetahui sejauh mana ketertarikan mahasiswi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik terhadap partai politik

**b. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

**1. Bagi Mahasiswi**

Menambah pemahaman mahasiswi tentang partai politik, dalam memahami kerangka berpikir mahasiswi terhadap politik.

**2. Bagi Universitas**

Untuk menambah bahan wacana serta memberikan masukan tentang materi pemahaman politik yang berkaitan terhadap partai politik, serta menambah referensi skripsi pada perpustakaan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

**3. Bagi Penyusun**

Penyusun dapat menerapkan ilmu yang didapat pada masa-masa dibangku kuliah dengan melihat kondisi yang nyata dan dapat menambah wawasan keilmuan dalam penelitian.

**D. Kerangka Dasar Teori**

**1. Persepsi**

**a. Penilaian dan Pendapat**

Persepsi merupakan proses pengorganisasian terhadap stimulus yang diterima oleh organisme atau individu sehingga merupakan sesuatu yang berarti dan merupakan aktifitas yang integral dalam diri individu.<sup>10</sup>

Sedangkan definisi persepsi menurut Adam Ibrahim Indra Wijaya, yakni siapapun yang mengambil inisiatif selalu berharap tujuannya berkomunikasi dapat diterima dan dimengerti oleh yang menerima. Penerimaan inilah yang disebut sebagai persepsi bagi persepsi adalah dasar proses kognitif atau proses psikologis.<sup>11</sup>

Persepsi merupakan cara seseorang menyerap dan mengorganisasikan informasi dalam lingkungan sekeliling. Persepsi merupakan proses pribadi, dimana pandangan seseorang terhadap sesuatu objek mungkin saja berbeda antara satu dengan lainnya. Hal ini disebabkan persepsi seseorang dipengaruhi atau ditentukan oleh berbagai faktor, yang oleh Indra Wijaya disebutkan antara lain<sup>12</sup> :

- a. Faktor lingkungan.
- b. Faktor konsepsi.
- c. Faktor yang berhubungan dengan konsep seseorang tentang dirinya sendiri.
- d. Faktor yang berhubungan dengan motif dan tujuan.
- e. Faktor pengalaman masa lampau.
- f. Faktor pengetahuan.

<sup>10</sup> Bimo Walgito, *Psikologi Sosial Sebagai Pengetahuan*, Andi Offset, Yogyakarta, 1991, hal 94.

<sup>11</sup> Adam Ibrahim I. W., *Perilaku Organisasi*, Sinar Baru, Jakarta, 1986. hal 24

<sup>12</sup> Ibid. hal 24

Persepsi merupakan salah satu faktor dalam diri seseorang yang mempengaruhinya dalam mengambil keputusan untuk berperilaku tertentu. Oleh karenanya persepsi ini sangat bersifat subjektif dan merupakan hasil penilaian terhadap suatu objek.

Manusia dalam hal ini sebagai perseptor dalam proses persepsi secara runtut melihat objek sasaran barang, kejadian dan atau hubungan antara keduanya, mendengar, menyentuh (kalau objek fisik) merasakan, atau memahami secara mendalam. Setelah itu perseptor mengorganisasikan penafsiran dan akhirnya menilai berdasarkan pengalaman yang dialaminya.

Menurut Jalaludin Rachmad persepsi adalah pengalaman tentang objek, peristiwa, atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dengan menafsirkan peta<sup>13</sup>.

Adam Ibrahim mengatakan bahwa persepsi adalah suatu proses dengan mana seorang mengorganisasikan dalam pikirannya, menafsirkan, menjalankan dan mengolah pertanda atau segala sesuatu yang terjadi di lingkungannya. Dengan demikian manusia menafsirkan atau menilai kepada sesuatu rangsangan selalu menggunakan indranya yaitu melalui proses mendengar, melihat, merasa, meraba dan mencium yang dapat terjadi terpisah-pisah atau serentak.

Hal ini jelas bahwa agar terjadi persepsi ada hal-hal yang mencakup dalam proses persepsi itu sendiri.

Syarat-syarat atau hal-hal yang harus ada adalah :

1. Objek atau sasaran yang diamati,

---

<sup>13</sup> Jalaludin Rachmad, *Persepsi Mahasiswa Terhadap Partai Politik*, Skripsi UMY 2000, hal 50.

2. Alat indra yang cukup baik untuk menangkap objek,
3. Perhatian, yang dalam hal ini merupakan persiapan dalam mengadakan pengamatan.

Berdasarkan pengamatan-pengamatan di atas, maka yang dimaksud dengan persepsi adalah suatu proses pemahaman mengenai hubungan peristiwa-peristiwa dan objek-objek sosial. Oleh sebab itu maka persepsi berada pada pikiran dan perasaan manusia secara pribadi, sehingga dimungkinkan antara orang yang satu dengan yang lain memiliki persepsi yang berbeda walaupun objek yang dikaji sama. Dengan kata lain persepsi itu berada pada alam subjektif dan bukan pada alam objektif. Akan tetapi walaupun persepsi berada pada alam subjektif, suatu persepsi tidak akan terbentuk tanpa berdasarkan pada kepentingan, pengalaman, pengaruh-pengaruh sosial yang kesemuanya terjadi di dalam masyarakat.

Jadi dapat disimpulkan bahwa persepsi merupakan proses yang terjadi dalam pribadi seseorang dalam memahami informasi atau menafsirkan dalam memberikan penilaian terhadap suatu objek berdasarkan faktor pengalaman, pengetahuan, konsepsi, motivasi dan faktor lingkungan.

b. Keterlibatan Politik

Perilaku politik merupakan komponen dalam sikap, yaitu komponen komponen konasi yang merupakan kesiapan atau kecenderungan bagi suatu jenis aksi tertentu, berhubungan dengan

obyek sikap.<sup>14</sup> Seperti di negara-negara yang sedang berkembang, di Indonesia pun sedang terjadi perdebatan akademis tentang pilihan dan penekanan pengembangan kemampuan umum masyarakat luas, termasuk kemampuan politik mereka. Terdapat strategi pengembangan yang bertumpu kepada bidang sosial budaya. Pendekatan pembangunan yang dikenal pula sebagai penghampiran kulturalisme ini sudah tumbuh terlebih dahulu.

Di Indonesia keterlibatan anggota masyarakat di dalam proses politik disalurkan melalui suatu wadah organisasi politik. Sehingga peneliti politik berpendapat bahwa agama, suku, ras, kedaerahan dan "kaitan dasar" lainnya merupakan faktor-faktor yang mengikat anggota masyarakat dalam satu kesatuan sosial yang pada gilirannya mewedahi dan memotivasikan kegiatan politik masyarakat atau warga negara tersebut.

Keterlibatan politik tergantung dari persoalan-persoalan, para pemimpin, gagasan-gagasan, lembaga-lembaga atau peristiwa-peristiwa politik. Suatu keterlibatan sikap yang bersifat kejiwaan boleh jadi bisa dan tidak dapat dicerminkan dalam tindakan-tindakan politik yang nyata walaupun sikap lebih abadi dari keadaan fikiran ataupun suasana hati yang fana, namun sikap cenderung berubah dengan berlalunya waktu dan dengan berubahnya keadaan, dan cenderung dipengaruhi motif. Keterlibatan sikap membentuk cara

rakyat merasakan dan menanggapi gejala politik. Para pemimpin politik telah lama mengakui bahwa suatu program sosial yang baru hanya bisa berjalan terus kalau ada keterlibatan warga dan selaras dengan tatanan sikap yang ada atau membentuk suatu perubahan sikap yang akan memberikan dukungan. Tetapi ikhtiar mengubah sikap yang keterlaluan dan jelas manipulatif akan mengundang sikap yang “*counterproductive*”<sup>15</sup>. Tujuan dari keterlibatan politik yang dilakukan oleh masyarakat adalah untuk mempengaruhi baik dalam artian memperkuatnya, maupun dalam artian menekannya sehingga memperhatikan atau memenuhi kepentingan pelaku partisipasi. Secara umum keterlibatan politik adalah masalah pokok ilmu politik, bahkan lembaga-lembaga politik secara sederhana merupakan tingkah laku yang sudah terpola. Sebagai pendekatan untuk study ilmu politik, perhatian terhadap perilaku individu atau kelompok telah memperkaya dimensi masalah pokok yang penting dalam ilmu politik, sehingga telah mengembangkan suatu prespektif yang melibatkan semua bidang ilmu pengetahuan.

Walaupun mahasiswa dapat menjadi katalisator dalam keterlibatan politik, tetapi jarang sekali dapat mendukung suatu perubahan sampai pada ujung penyelesaian. Perubahan yang dilakukan mahasiswa melalui pergerakannya harus ditampung dan diselesaikan oleh lembaga sosial lain yang lebih mapan. Hal ini bukan disebabkan

karena para mahasiswa kurang mampu atau kurang cerdas tetapi karena mahasiswa itu sendiri bersifat transitoir, bukan merupakan profesi, okupasi yang menjadi bidang pengabdian seumur hidup, namun peran dasar seorang mahasiswa sebagai cendekiawan muda tidaklah berubah, dan sekaligus mereka tetap akan berhadapan dengan dilema-dilema yang ada. Dilema terutama yang mereka hadapi sering kali menyangkut hubungannya dengan kekuasaan.

Dengan penjelasan diatas maka penyusun ingin mengetahui sejauh mana persepsi serta tindakan yang akan dilakukan oleh mahasiswa terhadap partai politik dimasa politik transisi sekarang terutama mahasiswi yang nantinya sebagai aktor intelektual dimasyarakat, sebab jika tidak selogan-selogan kesetaraan gender dibidang politik hanya sekedar sandiwara.

## **2. Demokrasi**

Demokrasi merupakan suatu keadaan yang ingin dicapai atau merupakan tujuan negara yang sebenarnya ingin direalisasikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, tetapi perealisasiannya demokrasi terwujud karena banyak kepentingan-kepentingan baik itu kepentingan kelompok atau pribadi yang ingin memperoleh keuntungan sendiri sehingga demokrasi yang kita inginkan dalam kehidupan politik itu jalan ditempat.

A.D. Lindsay menyebutkan syarat-syarat keadaan untuk disebut demokrasi, seperti adanya diskusi bebas, adanya toleransi untuk

warga masyarakat untuk menyampaikan perbedaan-perbedaan tersebut.<sup>16</sup>

Kemudian Lindblom mengemukakan syarat-syarat demokrasi yaitu:

- a. Kesempatan yang sama bagi warga masyarakat untuk mempengaruhi opini publik (*public opinion*).
- b. Adanya hukum (*majority rule*)
- c. Adanya kebebasan mutlak bagi setiap warga masyarakat untuk mengemukakan pendapatnya.

Sehingga dapat dikatakan bahwa dasar pokok dari kehidupan demokratis adalah kemampuan subordinate untuk mengontrol superior. Selain syarat tersebut, juga terdapat syarat yang penting, yakni perlindungan terhadap hak azasi manusia (*protection of human rights*).

Kita akan banyak mendapatkan berbagai definisi tentang demokrasi dari berbagai ahli politik tetapi kita dapat setuju terhadap sederetan syarat tentang suatu keadaan yang demokrasi sebagai :

- a. Adanya pengakuan terhadap hak-hak dasar manusia sebagai garansi terhindar dari intimidasi akibat aktifitasnya mengemukakan pendapat.
- b. Pluralisme merupakan syarat dari munculnya idea-idea yang berbeda.
- c. Adanya kompetisi yang bebas didasarkan *majority rule*.
- d. Kesejahteraan ekonomi merupakan kondisi yang diperlukan, tetapi bukan satu-satunya syarat bagi demokrasi

Untuk mewujudkan demokrasi maka harus ada langkah demokratisasi yang merupakan proses mendemokratisasikan lembaga-

lembaga politik seperti partai politik, hukum, lembaga-lembaga pemerintah dan perilaku lembaga-lembaga itu mendemokratisasikan keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Untuk itu lembaga-lembaga ini harus dijaga agar selalu setia pada nilai demokrasi.<sup>17</sup>

Penjelasan-penjelasan diatas menunjukkan bahwa demokrasi adalah pemerintahan oleh rakyat baik secara langsung maupun melalui wakil-wakil yang dipilih. Demokrasi juga bisa dimaknai sebagai bentuk masyarakat yang menghargai hak-hak asasi manusia secara sama, menghargai kebebasan dan mendukung toleransi, khususnya terhadap pandangan-pandangan kelompok minoritas.

Demokrasi dan pemilu berkaitan erat dalam substansi maupun fungsi. Pemilu merupakan aktualisasi nyata demokrasi dalam praktek bernegara masa kini (modern) karena menjadi sarana utama bagi rakyat untuk menyatakan kedaulatannya atas negara dan pemerintahan. Pernyataan kedaulatan rakyat diwujudkan dalam proses perlibatan masyarakat untuk menentukan siapa-siapa harus, disatu pihak menjalankan dan di lain pihak mengawasi pemerintahan negara. Karena itu fungsi utama pemilu bagi rakyat adalah “untuk memilih dan melakukan pengawasan terhadap wakil-wakil mereka”.

Berbicara demokrasi dan pemilu, tidak terlepas dari partai politik. Dalam pemilihan umum yang demokrasi, rakyat secara bebas memilih

partai politik yang dianggap dapat menampung aspirasi sehingga partai politik peserta pemilihan umum dapat berkompetisi secara bebas.

Kompetisi antara partai politik merupakan salah satu syarat terciptanya demokratisasi dalam tatanan politik suatu negara. Perkembangan partai politik di Indonesia telah mengalami pasang surut. Pada masa Orde lama partai politik boleh dikatakan memperoleh peluang yang sebesar-besarnya untuk berkembang secara maksimal, dalam periode ini Indonesia menganut sistem banyak partai dan hampir empat puluh partai yang terbentuk dengan tingkat otonomi yang sangat tinggi dalam proses rekrutmen, baik pengurus atau pimpinan partainya maupun para pendukungnya. Walaupun pada periode itu pemilu hanya satu kali dilaksanakan (tahun 1955) tetapi pemilihan umum tersebut benar-benar dilaksanakan dengan prinsip demokrasi. Kompetisi antara partai politik berjalan dengan sangat intensif. Partai politik dapat melakukan nominasi calonnya dengan bebas, kampanye dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab, dalam rangka mencari dukungan yang kuat dari masyarakat pemilih. Dan tidak kalah pentingnya adalah setiap pemilih dapat menggunakan hak pilihnya dengan bebas tanpa ada tekanan atau rasa takut.

Pada masa pemerintahan orde baru partai-partai di Indonesia memiliki ruang gerak yang terbatas. Hal ini disebabkan dengan adanya pemfusiian partai politik, dimana partai politik yang beraliran nasionalis

(Islam) terhimpun dalam Partai Persatuan Pembangunan ditambah satu golongan fungsionaris atau Golongan Karya yang didukung oleh pemerintah orde baru dan militer. Serta pemberlakuan Pancasila sebagai asas tunggal partai politik.

Setelah jatuhnya pemerintahan orde baru dengan gerakan Mei 1998, sistem kepartaian Indonesia merujuk kembali kearah demokrasis, ini dapat dilihat dari munculnya partai-partai politik peserta pemilu 1999 dimana partai-partai politik bebas memilih azas sebagai dasar ideologi partainya. Jatuhnya pemerintahan orde baru yang ditandai dengan pergantian pemimpin negara yaitu presiden Soeharto, Negara Indonesia mengalami demokrasi transisi, pada masa demokrasi transisi kompetisi partai politik kembali ramai. Partai politik diberikan peluang yang sebesar-besarnya untuk berkembang secara maksimal dan dalam periode ini indonesia menganut sistem banyak partai dengan tingkat otonomi yang sangat tinggi dalam proses rekrutmen baik pengurus atau pimpinan partainya dan para pendukungnya. Demokrasi transisi pasca soeharto melihat demokrasi indonesia saat ini tidak sekedar proses transisi dari rezim orde baru sampai menghasilkan rezim lain yang benar-benar memenuhi kaidah dan prinsip-prinsip dasar demokrasi, tapi lebih dari itu demokrasi ini adalah pelaksanaan politik yang melibatkan bukan saja proses transisi, tapi juga menyangkut pemulihan negara indonesia. Konseptualisasi demokrasi seperti yang dikatakan Muchtar Mas'ood<sup>27</sup> pada umumnya hanya menonjolkan dua karakteristik. Pertama, pendefinisian yang menekankan

pada dimensi prosedural yaitu demokrasi dipahami sebagai persoalan tata cara memerintah. Kedua, berkaitan dengan peranan “agen” sebagai determinan pokok dalam eksplanasi terhadap keberhasilan demokratisasi.<sup>18</sup>

Perubahan demokrasi transisi pada saat ini, pada dasarnya menghendaki terbentuknya *good governance* yang dianggap kompatibel dan sesuai dengan keinginan rakyat. Sementara *good governance* sendiri mensyaratkan transparansi dan akuntabilitas demokrasi serta adanya pengakuan hukum yang menjadi dasar norma-norma demokrasi. Dimasa demokrasi transisi sekarang ini, dipastikan terbentuk aturan-aturan dan lembaga-lembaga yang secara spesifik kompatibel untuk memilih pemimpin. Dalam perspektif demokrasi transisi, kondisi politik internal harus menunjukkan kondisi yang kondusif. Pergerakan massa yang mendukung salah satu elite politik, ditambah dengan kemungkinan benturan dengan massa yang kontra, serta pertikaian antar elite yang tidak ditunjukkannya dengan tanda-tanda dapat dilakukannya kompromi politik, justru memungkinkan terjadinya *chaos*. Dalam kondisi demikian, militer, sebagai salah satu kekuatan politik riil dan terorganisasi dapat masuk dan merebut kekuasaan dengan mudah. Masuknya militer ini tentu akan menghentikan laju transisi dan mengembalikan pengelolaan pemerintahan pada model otoriter seperti sebelumnya.

### **3. Partai Politik**

#### **a. Pengertian Partai Politik**

Selain penyelenggaraan pemilihan umum, partai politik sebagai pengelompokan masyarakat berdasarkan kesamaan platform politik merupakan suatu keharusan dalam negara yang demokratis. Banyak definisi yang dikemukakan oleh para ilmuwan tentang partai politik.

Dalam hal ini :

Mirriam Budiharjo menyatakan partai politik adalah suatu kelompok yang terorganisir anggota-anggotanya mempunyai orientasi nilai-nilai yang sama kelompok ini berusaha memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik dengan cara konstitusional untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan mereka.<sup>19</sup>

Dan adapun pengertian partai politik lainnya :

1. Menurut Mark M. Hagopian

Partai politik adalah suatu organisasi yang dibentuk untuk mempengaruhi bentuk dan karakter kebijaksanaan publik dalam rangkaian prinsip dan kepentingan ideologis melalui praktek kekuasaan secara langsung atau partisipasi rakyat.<sup>20</sup>

2. Menurut Carl J. Friedrich

Partai politik adalah sekelompok manusia yang terorganisasikan secara stabil dengan tujuan untuk merebut dan mempertahankan kekuasaan dalam pemerintahan bagi pemimpin partainya

---

<sup>19</sup> Mirriam Budiharjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, PT Gramedia Utama, Jakarta, 1999, Cetakan XIII hal 160-161,

berdasarkan kekuasaan itu akan memberikan kegunaan materiil dan idiil kepada para anggotanya<sup>21</sup>

### 3. Menurut Roger F Sołtau

Partai politik sebagai kelompok warga negara yang sedikit banyak terorganisasikan, yang bertindak sebagai suatu kesatuan politik dan dengan memanfaatkan kekuasaanya untuk memilih, bertujuan untuk menguasai pemerintahan dan menjalankan kebijakan umum yang mereka buat.<sup>22</sup>

Dari pengertian-pengertian partai politik diatas, pada dasarnya partai politik memiliki unsur :

- Partai politik adalah sekumpulan orang atau warga negara yang tergabung dalam organisasi yang teratur.
- Partai politik merupakan organisasi yang mempunyai cita-cita, tujuan dan orientasi.
- Partai politik bertujuan merebut dan mempertahankan kekuasaan.

Sehingga dapat diartikan bahwa partai politik merupakan sekelompok orang dalam suatu organisasi yang teratur, mempunyai cita-cita, orientasi dan tujuan, yakni merebut dan mempertahankan kekuasaan serta melaksanakan kebijaksanaan yang telah ditetapkan. Dalam kehidupan politik norma-norma politik pada dasarnya bersifat tetap dan kurang lebih mempunyai daya berlaku universal, dan norma-norma yang terbentuk berdasarkan konsesus nasional pada suatu masa.

Peraktek politik harus dipaksakan untuk disesuaikan dengan konsensus yang ada .

Pelebagaan politik juga sangat mendasar dalam proses penguatan demokrasi. Jika hak-hak individu dan kelompok harus dilindungi, proses berjalannya kekuasaan harus dikontrol, sistem peradilan yang legitimit, otonomi kelembagaan yang tinggi dan terakhir adalah bagaimana suara rakyat terakomodir didalam proses pemerintahan. Maka disinilah partai politik menjadi sangat penting, dimana institusi sipil yaitu eksekutif dan legislatif lebih mampu tampil sebagai pengelola dan pengawas yang kuat dalam proses pemerintahan.

#### **b. Fungsi Partai Politik**

Partai politik mempunyai fungsi sebagai sarana sosialisasi politik, dimana seseorang memperoleh pandangan orientasi dan nilai-nilai dari masyarakat dimana mereka berada, terutama dalam negara yang sedang berkembang yang bangsanya heterogen, partai politik juga membantu mengembangkan identitas nasional dan pemupukan integrasi nasional. Walaupun tidak disangkal banyak pada kenyataannya kepentingan partai diatas kepentingan nasional.

Miriam Budiharjo menyebutkan, dalam negara yang menganut paham demokrasi, partai politik menjalankan beberapa fungsi seperti :

##### **1. Sosialisasi Politik**

Proses pembentukan sikap dan orientasi politik para anggota masyarakat. Proses ini berlangsung seumur hidup yang diperoleh secara sengaja melalui pendidikan formal, non formal dan informal maupun secara tidak sengaja melalui kontak dan pengalaman sehari-hari baik dalam kehidupan keluarga atau dalam kehidupan masyarakat.

## 2. Rekrutmen Politik

Seleksi dan pemilihan atau pengangkatan seseorang atau kelompok orang untuk melaksanakan sejumlah peranan dalam sistem politik pada umumnya dan pemerintah pada khususnya.

## 3. Partisipasi Politik

Kegiatan warga negara biasa dalam mempengaruhi proses pembuatan dan pelaksanaan kebijaksanaan umum serta ikut menentukan pemimpin pemerintahan.

## 4. Memadu Kepentingan

Untuk menampung dan memadukan berbagai kepentingan yang berbeda bahkan bertentangan menjadi berbagai alternatif kebijakan umum, kemudian diperjuangkan dalam proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan politik.

## 5. Komunikasi Politik

Proses penyampaian informasi mengenai politik dari pemerintah kepada masyarakat dan dari masyarakat kepada pemerintah.

#### 6. Pengendalian Konflik

Mengendalikan konflik yang timbul dalam sistem politik melalui lembaga demokrasi untuk mendapatkan penyelesaian dalam bentuk keputusan politik.

#### 7. Kontrol Politik<sup>23</sup>

Kegiatan untuk menunjukkan kesalahan, kelemahan dan penyimpangan dari isi suatu kebijakan atau dalam pelaksanaan kebijakan yang dibuat dan dilaksanakan oleh pemerintah.

Dari tujuh fungsi partai politik tersebut ada fungsi lainnya, yang mana fungsi tersebut lebih banyak dimengerti oleh halayak umum dan disebut juga sebagai fungsi utama partai politik, adapun fungsi tersebut yaitu :

1. Mencari dan mempertahankan kekuasaan guna mewujudkan program-program yang disusun berdasarkan ideologi tertentu.
2. Mengumpulkan, mengorganisasi dan merumuskan aspirasi rakyat untuk diperintahkan oleh sistem politik.
3. Menempatkan wakil-wakil yang dipandang cukup untuk mewujudkan aspirasi rakyat.<sup>24</sup>

Dalam Negara demokrasi transisi sekarang ini adanya transisi partai politik menimbulkan perbedaan dan persaingan pendapat adalah

<sup>23</sup> Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik*, PT. Grafindo, Jakarta, 1992, hal 116-121.

<sup>24</sup> Riswanda Imawan, *Op. Cit*, hal 5

merupakan hal yang wajar. Tetapi dalam dalam masyarakat yang heterogen perbedaan pendapat berdasarkan perbedaan etnis, status, sosial ekonomi atau agama mudah sekali mengundang konflik. Dan pertikaian-pertikaian seperti ini dapat diatasi dengan bantuan partai politik sekurang-kurangnya dapat diatur sedemikian rupa sehingga akibat-akibatnya dapat diminimalkan.

### **c. Tugas dari Partai Politik**

Partai politik juga sangat berperan dalam proses pengutan demokrasi. Adapun tugas partai politik dilihat dari fungsinya dapat dikategorikan diantaranya:

1. Menjadi penghubung antara rakyat dan pemerintah, partai politik disini bertugas untuk menampung semua pendapat dan keinginan rakyat atau khalayak, kemudian langkah selanjutnya memilih dan merumuskannya serta menyerahkannya kepada pemerintah untuk dapat dijadikan politik yang akan diperjuangkan semaksimal mungkin.
2. Partai politik juga mempunyai tugas untuk menyebarluaskan gagasan atau ide-ide yang tersimpul didalam rencana kebijaksanaan pemerintah.
3. Partai politik mempunyai tugas untuk menambah dan memupuk kesadaran akan loyalitas nasional.
4. Partai politik bertugas mencari dan mengajak ikut serta mereka yang

dalam lapangan kegiatan politik dan mendidik mereka untuk menjadi kader pemimpin.

5. Partai politik bertugas untuk mengatur pertikaian dan membantu merumuskan konflik-konflik dan selanjutnya berusaha mengatasi konflik tersebut serta mencari penyelesaiannya.<sup>25</sup>

#### 4. Mahasiswa / Mahasiswi dan partai politik

Dalam kaitannya dengan merealisasikan kehidupan politik yang semakin demokratis, tentu membutuhkan peran serta seluruh komponen masyarakat, terutama para generasi muda yang terdidik, termasuk mahasiswa. Mereka sering dijuluki sebagai *agent of modernization* dan kadang dinamai *agent of development*.

Mahasiswa menurut Lewis Coser, adalah :

*Orang-orang yang kelihatannya tidak pernah puas menerima kenyataan sebagaimana adanya. Mereka mempertanyakan kebenaran yang berlaku pada suatu saat, dalam hubungannya dengan kebenaran yang lebih tinggi dan lebih luas.*<sup>26</sup>

Tidak berbeda dengan Lewis Coser, Edward Shils mengemukakan bahwa mahasiswa dalam pandangannya sebagai kaum cendekiawan yang mencari kebenaran.<sup>27</sup>

Dari pandangan-pandangan tersebut dapat dikemukakan bahwa setiap tindakan mahasiswa tidak boleh diwarnai oleh adanya *vested interes*. Oleh karena itu setiap tindakan atau gerakan yang dilakukan

---

<sup>25</sup> Sulistiati Ismail Gani, *Pengantar Ilmu Politik*, PT. Ghalia Indonesia, 1984, hal. 113.

mahasiswa harus berdasarkan komitmen terhadap kepentingan masyarakat.<sup>28</sup>

Keterlibatan mahasiswa atau mahasiswi terhadap politik tidak terlepas dari kenyataan bahwa universitas memiliki kedekatan dengan masyarakat. Hal ini menyebabkan seringkali pembenturan antara politisi-politisi (negara) dengan universitas maupun dengan mahasiswanya yang berakar dari masalah kepekaan nasionalistis para politisi terhadap sikap kemajuan dunia akademik.

Mahasiswa ataupun mahasiswi sering menentang para politisi dan kondisi politik yang *established*. Kritik tersebut seringkali dilontarkan dengan begitu tajamnya lantaran dalam pandangan para mahasiswa, para politisi (pemegang kekuasaan) dianggap telah gagal untuk mewujudkan "janji-janji" dan "harapan" yang ditawarkan dan atau diberikan ketika hendak memenangkan pemilihan umum.

Selain itu, sejalan dengan tumbuh dan berkembangnya era globalisasi dunia, dan dengan semakin derasnya dorongan untuk terciptanya iklim keterbukaan, maka keinginan kuat dari kalangan mahasiswa sebagai bagian dari masyarakat untuk mempercepat terwujudnya keterbukaan dan juga iklim yang lebih demokratis, sering menjadi sumber ketegangan antara mahasiswa (universitas) dengan politisi pemegang kekuasaan.

---

<sup>28</sup> *Ibid*, hal.108

Dalam perspektif dimensi historis, mahasiswa memang memiliki posisi strategis, sedangkan dalam posisi kehidupan kontemporer seharusnya mahasiswa mampu memiliki peran yang strategis. Dalam kehidupan kontemporer mahasiswa sebagai generasi muda cenderung menjadi pelanjut dari apa yang dilakukan oleh generasi pendahulunya, secara ideologis dan filosofis hal tersebut sangat merugikan karena dengan demikian seorang mahasiswa sebagai generasi muda tidak dapat mengembangkan kemampuan yang diperolehnya selama di perkuliahan. Namun disisi lain perilaku suatu generasi senantiasa dibentuk dari pengalaman generasi terdahulu hal tersebutlah yang menjadikan seorang mahasiswa yang tadinya idealis terhadap pemikirannya tetapi setelah dimasyarakatkan pemikiran tersebut berubah. Sehingga pola-pola pemikiran seperti itulah nantinya juga akan mengembalikan bangsa ini menjadi bangsa yang otoriter.

Seharusnya mahasiswa sebagai generasi muda yang membawa perubahan dapat memadukan antara kepentingan masyarakat dengan pemikiran pemikirannya untuk dipadukan dan menciptakan sistem pemerintahan yang baru yang sesuai dimasa demokrasi transisi sekarang ini dan yang akan datang.

Dari berbagai pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa mahasiswa adalah individu-individu yang sedang melaksanakan pendidikannya pada jenjang perguruan tinggi, seperti institut, universitas, sekolah tinggi,

kebenaran dan mempertanyakan kebenaran yang berlaku pada suatu saat dalam hubungannya dengan kebenaran yang lebih tinggi. Sedangkan dari sudut pandang politik kenegaraan, sepak terjang perempuan dalam dunia politik adalah suatu hal yang wajar. Pasal 27 UUD 1945 berbunyi “segala warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya” hal tersebut secara eksplisit menegaskan tidak ada perbedaan hak antara pria dan perempuan.

Bila dipandang dari bidang pendidikan mahasiswi sebagai warga negara turut berpartisipasi dalam proses politik sebagai sasaran untuk menyalurkan aspirasinya yang diharapkan dapat membantu memperbaiki kedudukannya setaraf atau sejajar dengan kaum pria nantinya dalam berpolitik.

#### **E. Definisi Konsepsional**

Definisi konsepsional adalah suatu usaha untuk menjelaskan mengenai pembatasan pengertian antara konsep yang satu dengan lainnya agar tidak terjadi kesalahpahaman. Adapun definisi konsepsional yang digunakan adalah:

1. *Persepsi* merupakan proses yang terjadi dalam pribadi seseorang dalam memahami informasi atau menafsirkan dalam memberikan penilaian terhadap suatu objek berdasarkan faktor pengalaman, pengetahuan, konsepsi, motivasi dan faktor lingkungan.

2. *Demokrasi* adalah pemerintahan rakyat, yang merupakan tatanan pemerintahan yang memungkinkan rakyat secara langsung atau tidak langsung berkuasa dan berdaulat penuh.
3. *Persepsi terhadap partai politik* adalah proses dimana seseorang menafsirkan atau memahami berdasarkan pengalaman, pengetahuan konsepsi, motivasi dan lingkungan tentang partai politik.
4. *Mahasiswa dan Mahasiswi* adalah individu-individu yang sedang melaksanakan pendidikannya pada jenjang perguruan tinggi, seperti universitas, sekolah tinggi, institut, akademi, dan lainnya yang sederajat. Mahasiswi adalah perempuan yang mencari ilmu atau menuntut ilmu disuatu perguruan tinggi, seperti universitas, sekolah tinggi, institut, akademi, dan lainnya yang sederajat.
5. *Partai politik* adalah setiap organisasi yang dibentuk oleh warga negara secara sukarela yang mempunyai tujuan, cita-cita dan orientasi untuk merebut dan mempertahankan kekuasaan serta memperjuangkan kepentingan anggotanya.

#### **F. Definisi Operasional**

Definisi Operasional adalah unsur penelitian yang memberitabukan bagaimana caranya mengukur suatu variabel. Dengan kata lain definisi operasional adalah semacam petunjuk pelaksanaan bagaimana caranya mengukur suatu variabel. Melalui definisi operasional akan ditentukan gejala atau indikator variabel dan bagaimana mengukur gejala atau indikator tersebut.

Persepsi yang didasari sikap mahasiswa terhadap partai politik merupakan wahana pendidikan politik rakyat yang selama ini terkekang. Persepsi mahasiswa terhadap partai politik ini dapat dilihat dari aspek sebagai berikut :

- a. Pengetahuan dan pemahaman mahasiswa terhadap partai politik dan peraturan perundang-undangan pemilu.
- b. Pengetahuan mahasiswa terhadap fungsi partai politik
- c. Pemahaman mahasiswa terhadap ideologi partai politik.
- d. Pemahaman mahasiswa terhadap tokoh-tokoh partai politik.
- e. Pemahaman mahasiswa terhadap visi, misi dan tujuan partai politik.
- f. Pemahaman mahasiswa terhadap pola pendekatan partai politik pada masyarakat.
- g. Pemahaman mahasiswa terhadap pola-pola kampanye yang dilakukan oleh partai politik.
- h. Pengetahuan dan pemahaman mahasiswa terhadap dampak multi partai.

## **G. Metode Penelitian**

### *1. Jenis Penelitian*

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif, adapun penelitian deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti dimana pemecahan masalah yang diselidiki dengan

(seseorang, lembaga dan lain-lain ) pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya di lapangan.<sup>29</sup>

## 2. *Unit Analisis*

Yang dimaksud dengan unit analisis adalah satuan tertentu yang yang diperhitungkan sebagai obyek penelitian. Dalam penelitian ini yang dijadikan sebagai unit analisisnya adalah mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Jurusan Ilmu Pemerintahan, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

## 3. *Data dan Sumber Data*

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

- a. **Data Primer** yaitu data yang diperoleh dari hasil penelitian secara langsung dan juga hasil wawancara dengan obyek penelitian.
- b. **Data sekunder** yaitu data yang diperoleh dari dokumentasi yang berupa buku-buku, jurnal, koran, majalah, dokumentasi-dokumentasi yang diperlukan sehingga dari data yang diperoleh tersebut nantinya akan penulis analisis melalui data sekunder yang digunakan untuk mendapatkan kesimpulan dari apa yang diteliti.

## 4. *Teknik pengumpulan data*

### a. **Kuesioner**

Kuesioner adalah teknik pengumpulan data dengan menyerahkan daftar pertanyaan untuk diisi sendiri oleh responden.<sup>30</sup> Selain itu

---

<sup>29</sup> Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 1995, hal 64.

peneliti akan memberikan beberapa pertanyaan yang telah dibuat sebelumnya untuk memperkuat penelitian.

**b. Dokumentasi**

Dokumentasi adalah pengumpulan data melalui dokumen-dokumen atau catatan yang tersedia yang menjadi objek penelitian. Teknik ini digunakan untuk memperoleh data sekunder yang berkaitan dengan penelitian ini.

**4. Teknik Sampling**

**a. Populasi dan Sampel**

Dalam melakukan penelitian ini, penulis hanya meneliti sebagian saja dari keseluruhan jumlah populasi mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Jurusan Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Berdasarkan data pengajaran fakultas Fisipol UMY jumlah mahasiswa adalah sebagai berikut :

**Tabel 1.1**

**Mahasiswi Aktif Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UMY  
Jurusan Ilmu Pemerintahan Tahun Akademik 2006-2007**

<b>Tahun Angkatan</b>	<b>Mahasiswa</b>	<b>Mahasiswi</b>
2003	82 orang	34 orang
2004	126 orang	55 orang
2005	62 orang	27 orang
<b>Jumlah</b>	<b>270 orang</b>	<b>116 orang</b>

Sumber : Data Pengajaran FISIPOL UMY tahun 2007

Dalam rangka memperkecil unit analisis, maka dilakukan penarikan sampel, karena apabila semua populasi dalam unit analisis diteliti, tentu memerlukan waktu, tenaga dan biaya yang cukup besar. Besarnya sampel yang harus diambil dari populasi menurut Kartini Kartono yaitu :

Pada prinsipnya tidak ada peraturan-peraturan yang ketat untuk secara mutlak menentukan berapa persen jumlah sampel tersebut harus diambil dari populasi.<sup>31</sup>

Dari pendapat tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa dalam menentukan suatu sampel yang representatif merupakan masalah yang dihadapi oleh seorang peneliti yang akan melakukan penelitian, namun peneliti tidak perlu ragu-ragu dalam menentukan besar sampel tersebut karena tidak ada ketentuan yang mutlak

Oleh karena itu besarnya sampel ditentukan sampai batas yang memungkinkan dapat mewakili populasi penelitian, sehingga data yang diperoleh dari sampel dapat menjawab permasalahan secara realibel.

Setelah melakukan pra penelitian diketahui bahwa jumlah populasi atau mahasiswa aktif Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik jurusan Ilmu Pemerintahan, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta tahun akademik 2006/2007 dari angkatan 2003-2005 dalam penelitian ini sebanyak 386 orang, dengan jumlah mahasiswi yang aktif angkatan 2003 sebanyak 34 orang, angkatan 2004 sebanyak 55 orang, dan angkatan 2005 sebanyak 27 orang. Jadi jumlah semua mahasiswi yang aktif sebanyak 116 orang. Mengenai besarnya sampel yang diambil minimal 10% dari jumlah satuan

elementer dari populasi.<sup>32</sup> Penulis mengambil sampel 50% dari jumlah populasi sehingga yang dijadikan sampel sebanyak 17 orang untuk angkatan 2003, untuk angkatan 2004 sebanyak 27 orang dan angkatan 2005 sebanyak 13 orang. Sampel diambil hanya dari angkatan 2003 sampai dengan 2005 karena mahasiswa angkatan ini masih aktif dan untuk membatasi besarnya populasi, selain itu untuk memperoleh hasil penelitian yang memuaskan populasi sampel yang diambil hanyalah mahasiswa ilmu pemerintahan universitas muhammadiyah yogyakarta angkatan 2003-2005, hal itu dilakukan karena untuk menghindari ketidak tahuan atau ketidak pahaman mahasiswa terhadap pertanyaan kuisisioner dan beberapa alasan yang harus diisi oleh responden. Sehingga untuk mahasiswa angkatan 2006 dan 2007 belum dapat memenuhi kriteria yang diharapkan, hal itu disebabkan untuk mahasiswa angkatan tersebut belum memenuhi cukup bekal sebagai mahasiswa yang mempelajari ilmu politik.

#### 6. *Teknik Analisa Data*

Dalam penelitian mengenai Persepsi Mahasiswa Terhadap Partai Politik ini menggunakan teknik analisis data secara kualitatif deskriptif. Setelah data diperoleh melalui berbagai macam cara (angket dan dokumentasi) selanjutnya menganalisisnya sesuai dengan gejala-gejala yang diteliti dan diinterpretasikan berdasarkan teori yang ada, seperti reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.<sup>33</sup>

<sup>32</sup> Masri Sangaribuan & Sofyan Efendi, *Metode penelitian Sosial*, LP3S, 1989, Jakarta, hal.106.

<sup>33</sup> Masri Sangaribuan & Sofyan Efendi, *Metode penelitian Sosial*, LP3S, 1989, Jakarta, hal.15.

Setelah diambil kesimpulan dalam tiap-tiap butir pertanyaan, maka untuk mengetahui rata-rata dari kesimpulan tersebut digunakan skala indeks.

Rumus mencari indeks :

$$I = \frac{1F_1 + 2F_2 + 3F_3 + 4F_4}{N}$$

I = Indeks

F = Frekuensi

N = Jumlah sampel

Sedangkan perhitungan interval dari nilai indeks adalah sebagai berikut :

$$\text{Interval} = \frac{\text{Nilai Tertinggi} - \text{Nilai Terendah}}{\text{Banyaknya Kriteria}}$$

$$\text{Interval} = \frac{2 - 1}{3} = 0,33$$

Dengan kategori :

1,67 – 2,00 termasuk kategori tinggi

1,34 – 1,66 termasuk kategori sedang

1 – 1,33 termasuk kategori rendah